



Katalog BPS: 4102002.1704

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Kabupaten Kaur 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR**

**INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
KABUPATEN KAUR
2014**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI(IKK) KABUPATEN KAUR 2014

Nomor Publikasi : 17040.1505
Katalog BPS : 4102002.1704
Ukuran Buku : 25,0 cm x 17,6 cm
Jumlah Halaman : viii + 37 halaman

Naskah :
Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Kaur

Gambar kulit :
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kabupaten Kaur

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada tahun 2015 ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur dapat menerbitkan publikasi **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur 2014**.

IKK Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan atau jawaban dalam salah satu variabel kebutuhan fiskal yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari survey serentak perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi Tahun 2014 dengan sumber data dari para pedagang besar/distributor, pedagang eceran, kontraktor, Dinas Pekerjaan Umum serta instansi terkait lainnya.

Kepada semua pihak yang telah ikut membantu terwujudnya penghitungan IKK sampai terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para pengguna data.

Kaur, Oktober 2015
Kepala BPS Kabupaten Kaur,

Ir. A r b i

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	Iii
Daftar Isi	Iv
Daftar Tabel	V
Daftar Gambar	Vi
Daftar Lampiran	Vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	4
BAB II METODOLOGI	6
2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data	7
2.2. Kegiatan Pengumpulan Data	8
2.3. Kuesioner yang Digunakan	9
2.4. Pemilihan Kualitas	9
2.5. Konsep dan Definisi.....	9
2.6. Metode Pengolahan Data	12
2.7. Metode Pengitungan IKK	12
2.8. Metode Analisis	16
BAB III PEMBAHASAN	18
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kaur	19
3.2. Gambaran Kependudukan	22
3.3. Gambaran Transportasi dan Infrastruktur Jalan	22
3.4. Diagram Timbang Umum IKK	23
3.5. IKK Kabupaten Kaur Tahun 2012	26
BAB IV KESIMPULAN	31
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Luas per Kecamatan, di Kabupaten Kaur Tahun 2014	21
Tabel 2. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kaur Tahun 2011-2013(dalam Ribu Rupiah)	25
Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2011-2014	28
Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014	29

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Lokasi Kabupaten Kaur	20
Gambar 2. Kondisi Jalan Menurut Kondisi di Kabupaten Kaur Tahun 2014.....	23
Gambar 3. Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Kaur Tahun 2014.....	23
Gambar 4. Proporsi Alokasi Belanja Modal Pembangunan Fisik Berdasarkan Realisasi APBD Tahun 2012.....	24
Gambar 5. Proporsi Alokasi Belanja Modal Pembangunan Fisik Berdasarkan Realisasi APBD Tahun 2013.....	25
Gambar 6. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2014	27

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur, 2014.....	34
Tabel 2. Panjang Jalan Menurut Pembiayaan, Jenis Permukaan, Kondisi, dan Kelas di Kabupaten Kaur, 2011-2014 (km)	35
Tabel 3. Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Kaur (JutaRupiah), 2012-2014	36
Tabel 4. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Kaur (JutaRupiah), 2012-2014	37

BAB 1

PENDAHULUAN

<http://kaukab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut direalisasikan oleh pemerintah dengan melakukan berbagai pembangunan fisik maupun non fisik yang tersebar sampai pelosok wilayah yang sekaligus secara bertahap diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Pembangunan fisik yang tersebar merata diharapkan dapat membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata, sehingga mengurangi kesenjangan sosial baik antar daerah maupun antar masyarakat.

Pembangunan fisik berupa gedung-gedung perkantoran, tempat ibadah, maupun tempat untuk kegiatan sosial masyarakat di berbagai bidang terus mengalami perkembangan yang dinamis sesuai dengan gerak roda perekonomian daerah. Dalam rangka mendukung semua keberhasilan pembangunan tersebut, pemerintah menempuh kebijakan otonomi daerah yang ditujukan agar pembangunan dapat dirasakan merata dan adil di seluruh wilayah. Disamping itu, kebijakan otonomi daerah dapat juga mengatasi masalah ketimpangan horizontal antar daerah dengan tujuan utama yaitu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengisyaratkan bahwasanya sebagian besar urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tersebut, maka kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi sangat strategis, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dengan besarnya kewenangan tersebut maka pemerintah daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa: Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).Kewenangan pembangunan yang besar

oleh pemerintah daerah ini disebut desentralisasi pembiayaan. Kewenangan ini diatur melalui UU No. 25 tahun 1999 mengenai pengaturan keuangan pusat dan daerah.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 sampai sekarang ini, salah satu sumber pendapatan utama daerah kabupaten/kota adalah DAU. Selama beberapa tahun terakhir pun, DAU juga merupakan salah satu sumber pendapatan utama Pemerintah Kabupaten Kaur dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Agar pembagian DAU ke daerah kabupaten/kota menjadi adil, proporsional, dan merata maka perlu adanya dukungan data yang valid, akurat dan terkini sebagai data dasar dalam penghitungan DAU yang didasarkan pada azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan lima variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Sehubungan dengan tugas dan fungsi BPS yang diatur dalam UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, maka dalam hal ini BPS merupakan penyedia data untuk empat komponen diantara lima komponen kapasitas fiskal penghitungan DAU. Data yang disediakan BPS untuk penghitungan DAU adalah jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tingkat kabupaten/kota dan propinsi seluruh Indonesia. DAU dihitung berdasarkan kesenjangan fiskal antar daerah, dimana kesenjangan fiskal merupakan selisih antara potensi dan kebutuhan daerah. Indikator-indikator pokok yang kebutuhan daerah dalam penghitungan DAU adalah Indeks Jumlah Penduduk (IP), Indeks Luas Wilayah (IW), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks PDRB perkapita (IPP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Salah satu indikator penting yang menunjukkan kebutuhan daerah dalam penghitungan DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Pentingnya IKK ini ditunjukkan oleh bobot penghitungannya dalam penghitungan DAU yang sangat besar. Dalam penghitungan tingkat kebutuhan fiskal daerah pada alokasi DAU 2015, IKK memiliki peran yang sama dengan jumlah penduduk, memiliki bobot tiga kali lipat dari IPM dan dua kali lipat dari bobot IPP dan IW.

$$DAU_{i,2015} = \text{Belanja Rata-rata Realisasi APBD}_{2013} (0,3 IP_{2014} + 0,15 IW_{2013} + 0,3 IKK_{2014} + 0,15 IPP_{2013} + 0,1 IPM_{2013})$$

Dari kelima variabel pada penghitungan DAU di atas terlihat bahwa jumlah penduduk dan kemahalan harga barang/jasa konstruksi memiliki bobot atau peran paling besar dalam menentukan tingkat kebutuhan fiskal suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa selain data jumlah penduduk maka data lain yang tak kalah penting yang harus dimiliki oleh suatu daerah adalah data harga barang-barang konstruksi. Oleh karena itu, sebagai daerah kabupaten yang sedang giat-giatnya membangun, Kabupaten Kaur sangat membutuhkan data harga barang-barang konstruksi yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam penghitungan IKK yang berimplikasi pada besaran DAU untuk tahun-tahun mendatang.

Dari keempat data yang dibutuhkan dalam penghitungan DAU, IKK merupakan salah satu data yang belum tersedia untuk seluruh kabupaten/kota yang ada, sehingga untuk itu diperlukan adanya pengumpulan data dari lapangan untuk melengkapi dan memperbaharui data sebelumnya. Dalam hal ini peranan BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota sangat besar khususnya dalam proses pengumpulan data dari lapangan yang lengkap dan terkini. Peranan BPS kabupaten/kota dalam hal ini BPS Kabupaten Kaur selain dalam pengumpulan data dari lapangan juga berperan untuk mensosialisasikan pentingnya data IKK kepada Pemerintah Kabupaten Kaur, sehingga data tersebut dapat memberi manfaat yang optimal bagi Pemerintah Kabupaten Kaur khususnya dalam penetapan nilai/biaya suatu bangunan konstruksi.

1.2. Tujuan

Dalam rangka optimalisasi manfaat IKK bagi Pemerintah Kabupaten Kaur upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis IKK Kabupaten Kaur untuk melihat secara utuh berbagai aspek tentang IKK seperti :

1. Memberikan gambaran komponen-komponen penyusun Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2014;
2. Mengetahui berapa nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2014;

3. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan daerah dan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Kaur kedepannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran;
4. Merupakan salah satu ukuran yang dapat menjadi starting point bagi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Kaur pada tahun-tahun yang akan datang; dan
5. Untuk membantu pengambil kebijakan, peneliti atau konsumen data lainnya dalam memahami keadaan masyarakat Kabupaten Kaur secara lebih spesifik.

<http://kaurkab.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

<http://kaurkab.go.id>

BAB II

METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota 2014 disusun berdasarkan jumlah kab/kota yang definitif, sedangkan IKK Provinsi dihitung di 33 Provinsi. Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK kabupaten/kota adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat, upah tenaga kerja yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Untuk penghitungan IKK Provinsi menggunakan data harga rata-rata dari seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Harga bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan meliputi barang-barang hasil pertambangan/penggalan dan barang-barang hasil industri pengolahan, dan jasa sewa alat berat.

Sumber data utama dalam penghitungan angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ini menggunakan data primer yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur, dan sebagai data pendukung adalah data sekunder dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur.

Data primer yang diambil di BPS didapat melalui survei yang dikenal dengan Survei Serentak Harga Bahan Bangunan/Konstruksi Tahun 2014. Sedangkan data sekunder berasal dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur, yakni realisasi belanja daerah APBD Kaur tahun 2013. Dari data APBD tersebut dibuat diagram timbang umum IKK Kabupaten Kaur, dengan cara dipilih pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dan kelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis bangunan, yaitu: bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; bangunan pekerjaan umum untuk pertanian; pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan, bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi; serta bangunan lainnya.

2.2. Kegiatan Pengumpulan Data

Untuk keperluan penghitungan IKK 2014 dilakukan survei serentak khusus untuk barang-barang konstruksi dan sewa alat berat yang menjadi paket komoditas IKK. Survei Serentak Harga Bahan Bangunan/Konstruksi ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota (491 kabupaten/kota) di 33 provinsi di Indonesia. Informasi yang ditanyakan adalah harga bahan bangunan, sewa alat-alat berat dan upah jasa konstruksi seperti yang terdapat pada kuisisioner survei. Survei serentak ini dilakukan empat kali dalam setahun yaitu pada tanggal 20-30 bulan Januari, Juli, dan Oktober dan 10-20 April.

Responden survei terdiri dari beberapa kategori yaitu pedagang besar/distributor, pedagang campuran, produsen, pedagang eceran, dan kategori lainnya seperti : kontraktor, dinas PU atau instalasi terkait lainnya (khusus untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat, dan upah pekerja),

Pemilihan responden diutamakan pedagang besar (PB), jika tidak ada PB maka dipilih responden dengan urutan skala prioritas yaitu dari pedagang campuran, produsen, dan pilihan terakhir yaitu pedagang eceran (PE). Pedagang campuran adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar. Jumlah sampel untuk setiap komoditas adalah 1-3 responden. Dari jumlah sampel ini diharapkan dapat melengkapi isian kuesioner.

Pencacahan dalam survei ini dilakukan dengan cara kunjungan dan wawancara langsung terhadap responden terpilih pada periode pencacahan. Jika tidak memungkinkan untuk wawancara langsung, maka kuesioner bisa ditinggal kepada responden untuk kemudian diambil kembali paling lambat keesokan harinya. Pada saat kuesioner diambil seyogyanya isian pada daftar tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan daftar isian telah terisi dengan baik dan benar.

2.3. Kuesioner yang Digunakan

Untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan dan sewa alat berat paket komoditas IKK digunakan satu kuesioner/daftar yaitu daftar VIKK2014. Daftar ini digunakan untuk mencatat harga bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi;

2.4. Pemilihan Kualitas

Agar hasil pengumpulan data harga dalam survei ini sesuai dengan kebutuhan data harga seperti yang tertuang dalam daftar VIKK2014, maka perlu dilakukan pemilihan kualitas sebagai berikut:

1. Kualitas terpilih harus kualitas yang telah ditentukan oleh BPS Pusat, yaitu kualitas umum yang biasanya ada di seluruh kabupaten/kota dan tertulis dalam pilihan daftar VIKK2013 sebagai pertanyaan tertutup. Contoh :
 - a. Jenis barang : semen Abu-abu
 - b. Kualitas : Tiga Roda 50 kg, Tiga Roda 40 kg
2. Apabila kualitas jenis barang atau bahan bangunan/konstruksi tidak tersedia dalam pilihan dalam kuesioner VIKK2014, maka pilih kualitas yang setara dan dominan digunakan di kabupaten/kota bersangkutan dengan menggunakan satuan standar yang tertulis dalam daftar VIKK2014 dalam isian yang terbuka. Contoh, apabila di daerah pencacahan tidak terdapat data harga cat kayu isi 1 kg dengan kualitas/merk Glotex, maka pilih kualitas yang setara dengan cat kayu Glotex tersebut dengan mengisi isian yang kosong/terbuka yang tersedia. Ukuran kesetaraan ini dapat dilihat dari kualitas/mutu maupun harganya.

2.5. Konsep dan Definisi

Kualitas hasil pengumpulan data dalam survei ini sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman petugas pengumpul data (pencacah) tentang konsep dan definisi dari beberapa istilah yang digunakan dalam pelaksanaan survei ini. Istilah-istilah dan konsep yang perlu dipahami tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Harga perdagangan besar (HPB)** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang besar pertama sebagai penjual dengan pedagang besar berikutnya sebagai pembeli secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang.
2. **Harga produsen** adalah harga transaksi yang terjadi antara produsen sebagai penjual dengan pedagang besar/distributor sebagai pembeli secara *party/grosir* di pasar pertama atas suatu barang.
3. **Harga eceran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang eceran sebagai penjual dengan konsumen sebagai pembeli secara eceran/satuan yang digunakan untuk konsumsi langsung bukan untuk diperjualbelikan.
4. **Harga pedagang campuran** adalah harga transaksi yang terjadi antara pedagang yang menjual barang secara partai/grosir dan juga menjual barang secara eceran dengan konsumen baik yang digunakan untuk konsumsi langsung atau konsumsi tidak langsung.
5. **HPB bahan bangunan/konstruksi** adalah harga berbagai jenis bahan bangunan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam jumlah besar (*party*) yang merupakan hasil transaksi antara pedagang besar/distributor/supplier bahan bangunan/konstruksi dengan pengguna bahan bangunan tersebut.
6. **Produsen** adalah Penghasil barang-barang baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan mesin.
7. **Pedagang Besar (PB)** adalah pedagang/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi secara *party/grosir* atau dalam jumlah besar.
8. **Pedagang campuran** adalah pedagang yang dalam menjual barang dagangannya sebagian dilakukan secara partai besar dan sebagian lagi dilakukan secara eceran, sedangkan data harga yang dicatat adalah harga untuk penjualan barang dalam partai besar.
9. **Pedagang Besar Pertama (PB I)** adalah pedagang besar sesudah produsen/penghasil.
10. **Party/grosir atau jumlah besar** yang dimaksud adalah bukan eceran. Batasan ini relatif mengingat sulit menentukan besarnya, baik kuantitas maupun nilai dari suatu komoditas. Hal ini sangat tergantung dari karakteristik komoditasnya sendiri.
11. **Kegiatan Konstruksi** adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi

yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan pembangunan baru. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Sedangkan kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan.

12. **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu seperti dalam waktu jam, hari, mingguan, dan bulanan. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah unit/jam.
13. **Excavator** adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk menggali tanah dan menuangkannya ke dalam kendaraan truk.
14. **Buldozer** adalah alat berat yang berfungsi untuk menggusur/memindahkan (mendorong) tanah dalam jarak pendek.
15. **Three Wheel Roller (Mesin Giling)** adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah atau mengeraskan permukaan jalan.
16. **Dumptruck**, sudah jelas.
17. **Mandor** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas untuk mengawasi jalannya proyek dan berkoordinasi dengan kepala tukang. Pada pekerjaan yang lebih kecil, Mandor merangkap kepala tukang.
18. **Kepala Tukang** adalah pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.
19. **Tukang batu** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas untuk memasang batu kali, batu bata, ubin, dan membuat plester tembok. Alat kerja yang digunakan biasanya adalah cetok, mal, dan *water pass*.
20. **Tukang kayu** adalah buruh konstruksi yang mempunyai tugas untuk membuat struktur bangunan dari kayu dan alat kerja yang digunakan biasanya adalah serut, gergaji, bor, pahat, dll.
21. **Tukang cat** adalah buruh konstruksi yang bekerja untuk mengecat tembok, papan, dan dinding lainnya.
22. **Tukang listrik** adalah buruh konstruksi yang memiliki tugas memasang instalasi listrik dan perlengkapannya dan memasang sistem listrik generator, trafo, dll.

2.6. Metode Pengolahan Data

Setelah tahap pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer atau software yang meliputi tahapan :

- a. pemeriksaan data
- b. *editing coding* (penyuntingan data dan pengkodean)
- c. *entry data* (perekaman data)
- d. validasi dan tabulasi data

2.7. Metode Penghitungan IKK

Sebelum metode penghitungan IKK dijelaskan, perlu pula dipahami mengenai konsep dan definisi. Beberapa konsep dan definisi yang perlu dipahami adalah mengenai kegiatan konstruksi dan klasifikasi jenis bangunan.

Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pembangunan baru, perluasan, renovasi/pemugaran, pemeliharaan/perbaikan, pembongkaran, penyiapan lahan (tidak termasuk pembelian lahan/tanah). Kegiatan konstruksi ini dibedakan/kelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis bangunan/konstruksi, yaitu:

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
2. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian;
3. Pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan;
4. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi;
5. Bangunan lainnya

Kemudian konsep dan definisi dari kelima jenis bangunan tersebut adalah :

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal
 - a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi : rumah yang dibangun sendiri, real estate, rumah susun, dan perumahan dinas.

- b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi : konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - a. Bangunan pengairan, meliputi : pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
 - b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi : bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.
 3. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
 - a. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi : pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan jalan dan jembatan kereta, pembangunan jalan dan jembatan kereta.
 - c. Bangunan dermaga, meliputi : pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
 4. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, Air minum, dan komunikasi
 - a. Bangunan elektrik, meliputi : pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi : bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar microwave, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
 - e. Instalasi air, meliputi : instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
 - f. Instalasi listrik, meliputi : pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
 - g. Instalasi gas, meliputi : pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.

- h. Instalasi listrik jalan, meliputi : instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
 - i. Instalasi jaringan pipa, meliputi : jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
5. Bangunan lainnya, meliputi : bangunan sipil, pembangunan lapangan olah raga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman.

Selanjutnya dalam penghitungan IKK Kabupaten/Kota atau Provinsi dibutuhkan beberapa data penunjang, yaitu: paket komoditas, diagram timbang, dan harga bahan-bahan bangunan yang dominan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK.

2.7.1. Paket Komoditas

Yang dimaksud dengan paket komoditas IKK adalah suatu keranjang atau paket yang mencakup sejumlah bahan bangunan/konstruksi yang cukup dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan/konstruksi. Untuk penghitungan IKK tahun 2013 diperkirakan jumlah bahan bangunan dan sewa alat-alat berat yang menjadi paket komoditas berjumlah 22 terdiri dari 17 jenis bahan bangunan, yaitu: pasir pasang, batu kali, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang dan 4 sewa alat berat, yaitu: *excavator*, *bulldozer*, *three wheel roller* (mesin gilasp), *dump truck*, dan upah.

Azaz pemilihan paket komoditas adalah :

1. *Comparability* (keterbandingan)
2. *Representativeness* (mewakili)
3. *Trade off comparability vs representativeness*

Selanjutnya tahapan dalam pemilihan paket komoditas IKK adalah :

- Spesifikasi/kualitas barang dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan maka cari kualitas yang setara.
- Spesifikasi/kualitas barang setiap periode pencacahan harus sama.

- Jenis barang yang dicatat harganya merupakan barang *ready stock*, harus benar-benar diperdagangkan di kabupaten/kota itu sendiri kecuali untuk barang-barang natural. Pencacahan barang natural (pasir, batu pondasi, batu split, batu bata, batako, dan kusen) tidak harus *ready stock*

2.7.2. Diagram Timbang

Diagram Timbang yang digunakan dalam penghitungan IKK terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang umum. Diagram timbang kelompok jenis bangunan disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan/sewa alat berat/upah jasa yang dibutuhkan untuk membangun satu unit jenis bangunan per satuan ukuran luas. Data kuantitas/volume bahan bangunan tersebut diperoleh dari hasil studi pilot tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi.

Diagram timbang umum IKK adalah bobot atau andil masing-masing kelompok jenis bangunan yang akan digunakan untuk menghitung IKK umum. Diagram timbang umum IKK ini disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja pembangunan dan rutin. Data realisasi APBD ini dapat diperoleh dari Pemerintah Kab/Kota. Untuk keperluan penghitungan IKK umum kabupaten/kota atau provinsi tahun 2013 digunakan data Realisasi APBD tahun 2012. Dari data APBD tersebut dipilih pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) jenis bangunan.

2.7.3. Formula Penghitungan

- Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (TKKKab)_j

$$TKK Kab_j = \sum_{i=1}^m P_i \cdot Q_{ij}$$

i = jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat

j = kelompok jenis bangunan j

P_i = harga jenis barang/bahan bangunan i

Q_{ij} = kuantitas/volume bahan bangunan i dan kelompok jenis bangunan j

- b. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Rata-rata nasional (TKKNas)_j

$$TKK\ Nas_j = \frac{\sum_{k=1}^n TKK\ Kab_j}{n}$$

n = total kabupaten di Indonesia ($n = 491$)

- c. Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (IKKKab)_j

$$IKK\ Kab_j = \frac{TKK\ Kab_j}{TKK\ Nas_j} \times 100$$

- d. Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/Kota (IKKUmumKab)

$$IKK\ Umum\ Kab = \sum_{j=1}^5 IKK\ Kab_j \cdot Q_i$$

Q_i = diagram timbang IKK umum kabupaten/kota

2.8. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk mempermudah analisis tabel-tabel dan grafik secara sederhana sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan dari obyek penelitian. Dalam publikasi ini, analisis tersebut digunakan untuk menginterpretasikan angka IKK Kabupaten Kaur, jika dibandingkan dengan angka IKK Kab/Kota lain di Provinsi Bengkulu dan angka nasional (standar).

Beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam analisis IKK tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. IKK 2011-2014 disajikan dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, dimana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata sebagai kota acuan atau provinsi acuan.
2. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKKnya dan literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar.

<http://kaurkab.bps.go.id>

<http://kaurkab.bps.go.id>

BAB 3 PEMBAHASAN

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabupaten ini dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003. Ibukota kabupaten ini adalah Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan dengan jarak tempuh 250 km dari Kota Bengkulu atau merupakan kabupaten terjauh kedua setelah Kabupaten Mukomuko di Provinsi Bengkulu..

Secara astronomis Kabupaten Kaur terletak pada posisi $4^{\circ} 15' 8,21''$ – $4^{\circ} 55' 27,77''$ Lintang Selatan (LS) dan $103^{\circ} 4' 8,76''$ – $103^{\circ} 46' 50,12''$ Bujur Timur (BT). Kondisi astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Kaur beriklim tropis atau Iklim A karena terletak antara $0^{\circ} - 23\frac{1}{2}^{\circ}$ LS. Pada tahun 2014, tercatat suhu udara rata-rata di Kabupaten Kaur mencapai $26,88^{\circ}\text{C}$, tekanan udara 1.010,33 mb, rata-rata jumlah hari hujan per bulan 11,58 kali dengan rata-rata curah hujan mencapai 223,50 mm.

Musim yang terjadi di Kabupaten Kaur sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal dua musim, yaitu musim hujan (Desember-Maret) dan musim kemarau (Juni-September) sementara pada bulan April-Mei dan Oktober-November merupakan masa peralihan/pancaroba.

Secara geografis Kabupaten Kaur terletak di sebelah barat Pegunungan Bukit Barisan, termasuk dalam wilayah administrasi paling selatan Provinsi Bengkulu, Indonesia. Berjarak sekitar 250 km dari ibukota Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Lampung ke arah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, secara administrasi Kabupaten Kaur berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah selatan : Kabupaten Pesisir Barat (pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat), Provinsi Lampung;
- Sebelah barat : Samudera Hindia; dan
- Sebelah timur : Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1.
Peta Lokasi Kabupaten Kaur



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Undang-undang tersebut dan surat Mendagri No. 136/205/PUM tanggal 12 September 2005, luas wilayah daratan Kabupaten Kaur mencapai 2.365 km² atau 236.500 Ha, panjang garis pantai 89,17 km dan luas kawasan laut sejauh 4 mil dari garis pantai seluas 660,59 km².

Topografi wilayah Kabupaten Kaur terbagi menjadi 3 (tiga) jalur yaitu :

1. Jalur *Low Land* (dataran rendah) dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Wilayah yang termasuk dalam Jalur *Low Land* mencapai 9% atau 20.889 hektar.

Kecamatan yang termasuk ke dalam Jalur *Low Land* adalah Kecamatan Tanjung Kemuning, Semidang Gumay, Kaur Utara, Tetap, Kaur Selatan, Maje dan Nasal.

2. Jalur Bukit *Range* dengan ketinggian 100 – 1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Bukit *Range* mencapai 61% atau 144.026 hektar. Semua kecamatan di Kabupaten Kaur sebagian wilayahnya ada yang masuk katagori jalur ini.
3. Jalur Pegunungan dengan ketinggian > 1.000 m. Wilayah yang termasuk dalam Jalur Pegunungan mencapai 30% atau 71.585 hektar. Di Kabupaten Kaur, yang termasuk ke dalam jalur ini adalah kawasan Bukit Barisan.

Tabel 1.
Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nasal	Merpas	519,92
2.	Maje	Linau	361,04
3.	Kaur Selatan	Bintuhan	92,75
4.	Tetap	Tetap	87,92
5.	Kaur Tengah	Tanjung Iman	26,40
6.	Kinal	Kinal	154,03
7.	Semidang Gumay	Mentiring	64,91
8.	Muara Sahung	Ulak Lebar	256,00
9.	Luas	Benua Ratu	124,88
10.	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning	72,91
11.	Lungskang Kule	Sukananti	32,00
12.	Kaur Utara	Simpang Tiga	49,80
13.	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun III	370,64
14.	Padang Guci Hilir	Gunung Kaya	115,96
15.	Kelam Tengah	Rigangan I	35,84
Kabupaten Kaur		Bintuhan	2.365,00

Sumber : BPS Kabupaten Kaur

Pada tahun 2003 di awal pembentukannya, Kabupaten Kaur memiliki tujuh kecamatan induk, yaitu Kecamatan Nasal, Maje, Kaur Selatan, Kinal, Kaur Tengah, Tanjung Kemuning dan Kaur Utara. Namun, hingga tahun 2014 jumlah kecamatan di Kabupaten Kaur sudah berjumlah lima belas kecamatan yang terdiri atas 192 desa dan tiga kelurahan.

3.2. Gambaran Kependudukan

Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Kaur diperkirakan mencapai 114.398 jiwa yang terdiri dari 59.187 laki-laki dan 55.211 perempuan dengan rasio jenis kelamin 107. Ini artinya, setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Kaur terdapat 107 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 2.365,00 km², kepadatan penduduknya mencapai 48 jiwa per km².

Sebaran penduduk menurut kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten ini tidak merata. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kelam Tengah dengan tingkat kepadatan 175 jiwa per km² dan Kecamatan Kaur Tengah dengan tingkat kepadatan 168 jiwa per km². Sedangkan kecamatan paling jarang adalah Kecamatan Padang Guci Hulu dengan kepadatan 18 jiwa per km².

3.3. Gambaran Transportasi dan Infrastruktur Jalan

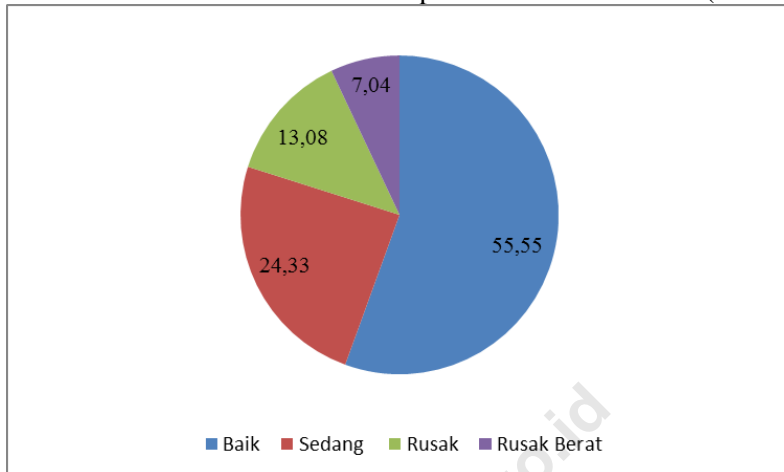
Indeks Kemahalan konstruksi (IKK) dihitung dengan mengumpulkan sejumlah harga komoditi di bidang konstruksi. Salah satu hal yang berpengaruh dalam membentuk harga di suatu wilayah antara lain ketersediaan barang dan jasa dan kelancaran pendistribusian barang ke wilayah tersebut. Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa diperlukan sarana penunjang berupa sarana transportasi maupun infrastruktur jalan.

Media transportasi di Kabupaten Kaur masih mengandalkan transportasi darat dalam mendistribusikan barang dan jasanya. Alat transportasi roda empat belum mengalami perkembangan yang tinggi. Perkembangan jumlah transportasi darat yang terus mengalami perkembangan adalah kendaraan roda dua atau motor.

Infrastruktur jalan darat yang menghubungkan antar wilayah di kabupaten ini terbentang sepanjang 719,30 km yang terdiri dari jalan negara sepanjang 85,25 km, jalan provinsi sepanjang 120,03 km, dan jalan kabupaten sepanjang 514,02 km. Berdasarkan kondisinya, jalan di Kabupaten Kaur sebanyak 55,55 persen kondisinya baik, 24,33 persen kondisi sedang, 13,08 persen kondisi rusak dan 7,04 persen kondisi rusak berat.

Gambar 2.

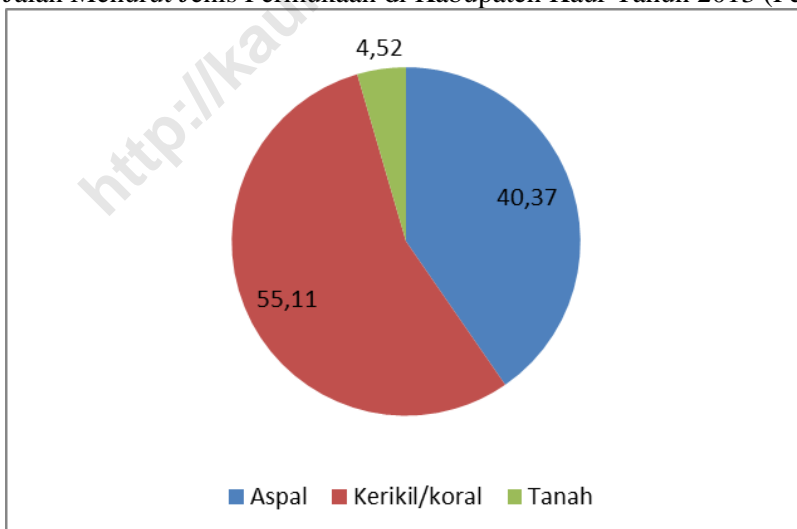
Kondisi Jalan Menurut Kondisi di Kabupaten Kaur Tahun 2013 (Persen)



Berdasarkan jenis permukaannya, dari total 719,30 km panjang jalan di Kabupaten Kaur, 290,42 km (40,37 persen) merupakan jalan diaspal, 396,42 km (55,11 persen) merupakan jalan koral/kerikil, 32,46 km (4,52 persen) merupakan jalan tanah.

Gambar 3.

Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Kaur Tahun 2013 (Persen)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

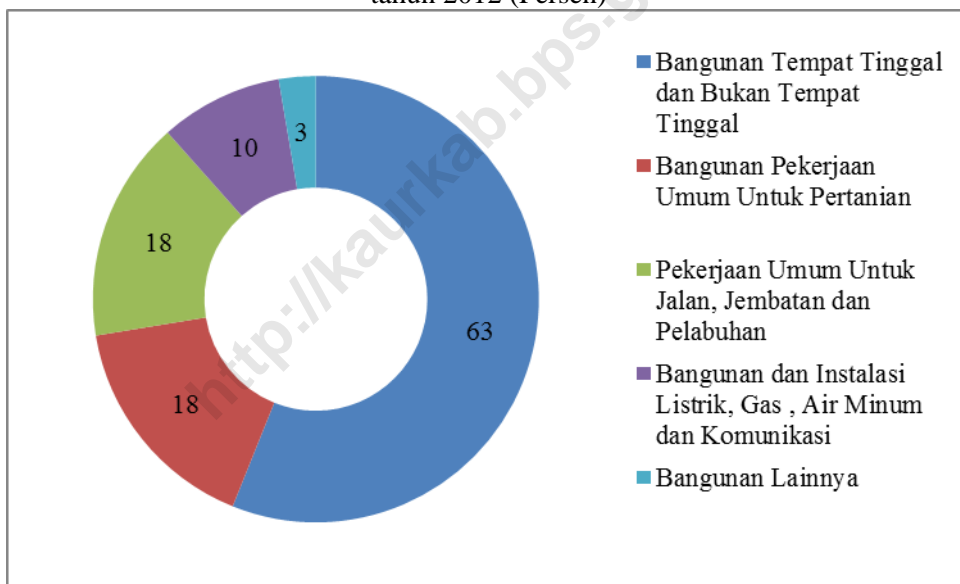
3.4. Diagram Timbang Umum IKK

Kabupaten Kaur termasuk kabupaten yang tergolong baru di Indonesia. Sebagai kabupaten baru, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kaur adalah pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Kaur

telah mengalokasikan sebagian anggaran pendapatannya guna melakukan pembangunan fisik baik berupa bangunan gedung, infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan pertanian, dan sebagainya.

Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur tahun 2012, pemerintah daerah Kabupaten Kaur mengalokasikan 63 persen untuk bangunan gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, 18 persen dialokasikan untuk bangunan jalan, jembatan dan pelabuhan, serta 19 persen dialokasikan untuk bangunan lainnya.

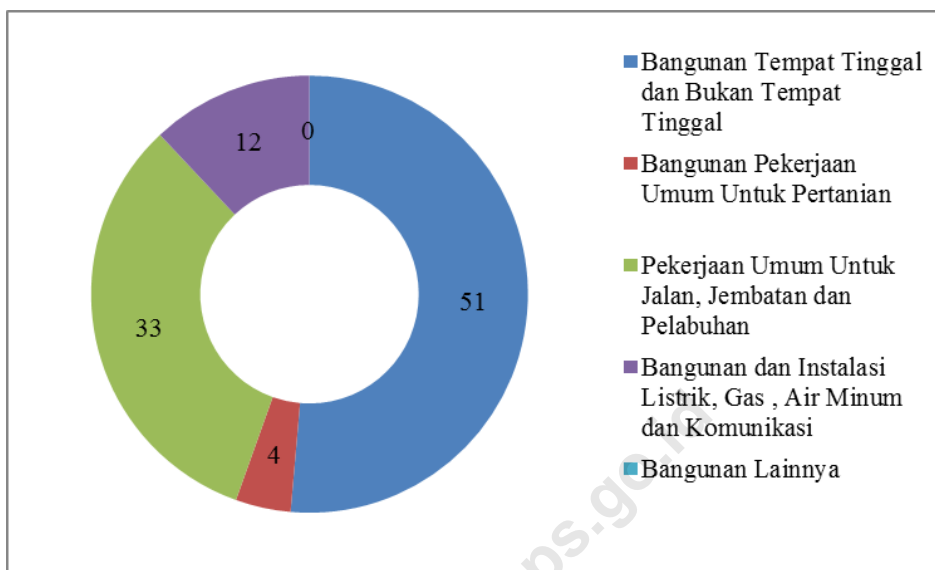
Gambar 4.
Proporsi Alokasi Belanja Modal Pembangunan Fisik Berdasarkan Realisasi APBD tahun 2012 (Persen)



Sumber : DPPKAD Kabupaten Kaur

Sedangkan pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kaur telah mengalokasikan 51 persen untuk bangunan gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, 33 persen dialokasikan untuk bangunan jalan, jembatan dan pelabuhan, serta 16 persen dialokasikan untuk bangunan lainnya. Dari angka tersebut dapat dianalisis bahwa pada tahun 2012 dan 2013 pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan baik pembangunan baru maupun rehabilitasi gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal seperti gedung perkantoran.

Gambar 5.
Proporsi Alokasi Belanja Modal Pembangunan Fisik Berdasarkan Realisasi APBD tahun 2013 (Persen)



Kebutuhan akan keuangan daerah menjadi suatu syarat pembangunan fisik dapat berjalan lancar. Dengan kondisi Kabupaten Kaur yang merupakan kabupaten pemekaraan yang belum lama berdiri sudah selayaknya pemerintah daerah untuk dapat mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa: Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 2.
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kaur 2011-2013 (dalam Ribu Rupiah)

Jenis Pendapatan (1)	2011 (2)	2012 (3)	2013 (4)
Pendapatan Daerah	365.412,75	430.697,08	460.162,25
1. Pendapatan Asli Daerah	6.810,59	7781,83	10.376,76
2. Dana Perimbangan	309.867,70	367.406,83	411.348,45
2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.707,84	27.917,25	25.204,42
2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	248.742,46	301.076,66	329.881,35
2.3. Dana Alokasi Khusus	36.417,40	38.412,51	38.437,04
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	48.734,46	55.508,42	38.437,04

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kaur

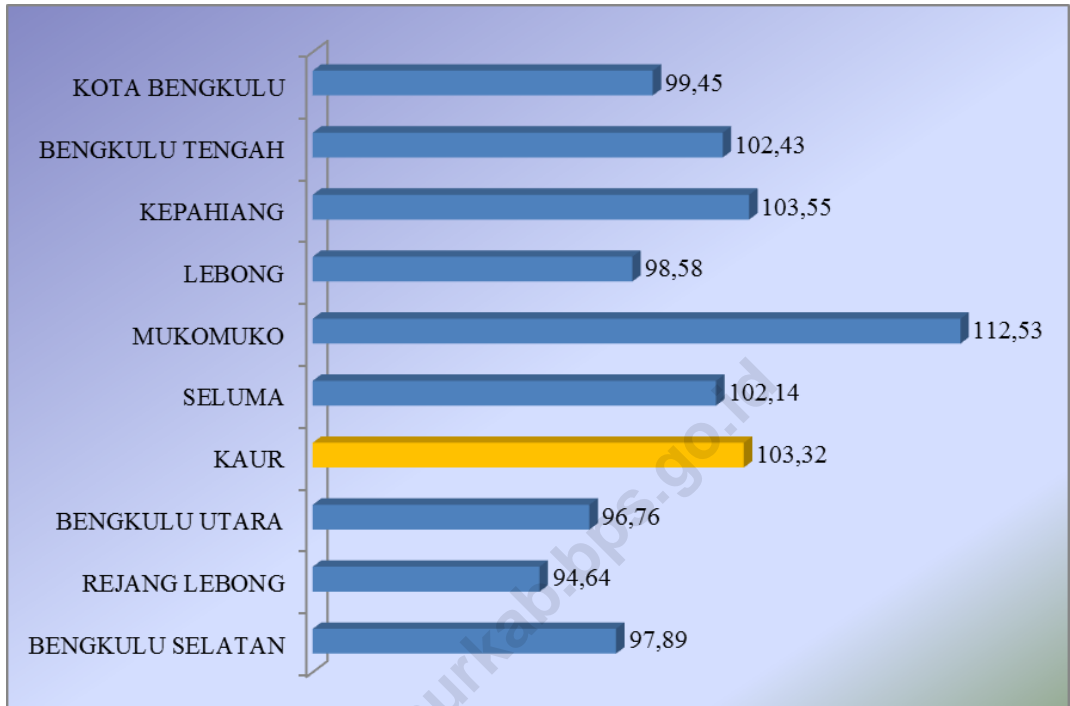
Dalam menjalankan roda pemerintahan dan membangun wilayahnya, Kabupaten Kaur masih bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat tersebut. Total anggaran pendapatan Kabupaten Kaur pada tahun 2013 sebesar 460,16 milyar rupiah. Sebagian besar anggaran tersebut merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan sebesar 411,35 milyar rupiah yang terdiri dari 329,88 milyar rupiah merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) atau sebesar 89,39 persen dari total pendapatan daerah dan 38,44 milyar rupiah merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sebesar 8,35 persen dari total pendapatan daerah. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10,38 milyar rupiah atau 2,25 persen dari total pendapatan daerah.

3.5. IKK Kabupaten Kaur Tahun 2014

Penghitungan IKK dilakukan pada setiap kabupaten/kota dan Provinsi se-Indonesia dengan menggunakan metode jenis barang dan jasa, serta saat pencacahan yang sama sehingga hasilnya *comparable* untuk menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi antar wilayah se-Indonesia dalam kurun waktu yang sama. IKK tahun 2014 telah dihitung untuk seluruh kabupaten/kota dan 33 Provinsi se-Indonesia, termasuk diantaranya adalah IKK Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Nilai IKK 2014 merupakan salah satu variabel dalam penentuan DAU tahun anggaran 2014. Pada tahun 2011-2014, IKK disajikan dengan menentukan IKK Nasional sama dengan 100, sehingga rata-rata IKK Kabupaten dan IKK Provinsi menggunakan IKK Nasional sebagai acuan.

Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKKnya dan literatur tentang indeks spasial pada umumnya mengacu pada satu wilayah tertentu sebagai dasar.

Gambar 6.
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Dalam Wilayah
Provinsi Bengkulu Tahun 2014



Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur pada tahun 2014 mencapai 103,32. Hal ini dapat diartikan harga barang dan jasa konstruksi di Kabupaten Kaur lebih tinggi dibandingkan Provinsi Bengkulu (96,21) dan nasional. Diantara sepuluh kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu, IKK Kabupaten Kaur menempati peringkat ketiga diantara kabupaten/kota lainnya dalam Provinsi Bengkulu. Peringkat sebelumnya ditempati oleh Kabupaten Mukomuko sebesar 112,53 dan Kabupaten Kepahiang sebesar 103,55. Kota Bengkulu sendiri sebagai titik awal bagi pendistribusian beberapa jenis barang konstruksi hasil industri ke beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu memiliki nilai IKK sebesar 99,45.

Tabel 3.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu 2011-2014

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BENGKULU SELATAN	97,85	92,32	94,44	97,98
2	REJANG LEBONG	92,84	86,90	90,67	94,64
3	BENGKULU UTARA	92,49	91,03	93,46	96,76
4	KAUR	99,13	90,97	100,50	103,32
5	SELUMA	92,95	96,48	101,78	102,14
6	MUKOMUKO	93,61	97,42	110,67	112,53
7	LEBONG	91,52	92,68	99,23	98,58
8	KEPAHIANG	94,35	90,02	102,85	103,55
9	BENGKULU TENGAH	90,94	96,53	104,49	102,43
10	BENGKULU	86,86	96,44	100,93	99,45
11	PROV. BENGKULU	89,52	87,47	94,98	96,21
12	NASIONAL	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dengan melakukan penyesuaian rata-rata nasional = 100 sebagai dasar pembandingan, tetap terlihat bahwa besaran IKK Kabupaten Kaur senantiasa berada di atas rata-rata Provinsi Bengkulu (Tabel 3). Pada tahun 2011, Kabupaten Kaur menempati posisi pertama diantara kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Kondisi ini menggambarkan bahwa relatif harga barang/jasa konstruksi di Kabupaten Kaur pada tahun 2011 belum membaik. Hal ini juga menandakan bahwa arus perdagangan barang/jasa konstruksi belum sepenuhnya terbuka meskipun sudah didukung dengan peningkatan kualitas jalan di Kaur. Pada tahun 2012 terjadi penurunan relatif harga bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya terbukti dengan hanya menempati posisi kedelapan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan relatif harga karena kedudukan Kabupaten Kaur pada tahun 2013 menjadi posisi keenam. Sedangkan tahun 2014 kedudukan Kabupaten Kaur naik menjadi posisi ketiga. Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa IKK Kabupaten Kaur pada tahun 2011 dan 2012 lebih rendah dari IKK nasional. Pada tahun 2013 dan 2014 IKK Kabupaten Kaur sedikit lebih tinggi dari IKK nasional

Tabel 4.
Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2014

NO	PROVINSI	IKK	RANKING
(1)	(2)	(3)	(4)
1	NAD	93,54	21
2	SUMATERA UTARA	96,08	17
3	SUMATERA BARAT	92,9	22
4	R I A U	102,89	9
5	J A M B I	94,9	18
6	SUMATERA SELATAN	98,8	14
7	BENGKULU	96,21	16
8	LAMPUNG	91,87	23
9	KEP. BANGKA BELITUNG	102,09	10
10	KEPULAUAN RIAU	107,34	6
11	DKI JAKARTA	97,13	15
12	JAWA BARAT	88,05	28
13	JAWA TENGAH	83	32
14	DI YOGYAKARTA	84,81	31
15	JAWA TIMUR	87,82	29
16	B A N T E N	89,19	26
17	B A L I	91,67	24
18	NUSA TENGGARA BARAT	81	33
19	NUSA TENGGARA TIMUR	89,31	25
20	KALIMANTAN BARAT	109,48	5
21	KALIMANTAN TENGAH	103,23	8
22	KALIMANTAN SELATAN	99,18	13
23	KALIMANTAN TIMUR	100	11
24	SULAWESI UTARA	109,88	4
25	SULAWESI TENGAH	86,62	30
26	SULAWESI SELATAN	88,55	27
27	SULAWESI TENGGARA	99,67	12
28	GORONTALO	93,62	20
29	SULAWESI BARAT	94,79	19
30	M A L U K U	104,43	7
31	MALUKU UTARA	117,89	3
32	PAPUA BARAT	125,79	2
33	PAPUA	191,86	1

Sumber : Badan Pusat Statistik

Selanjutnya, Tabel 4 menunjukkan perbandingan IKK antarprovinsi di Indonesia. Provinsi Bengkulu memiliki IKK sebesar 94,98. Hal ini menunjukkan bahwa harga bahan bangunan/konstruksi di Bengkulu relatif lebih murah, karena indeksnya kurang dari 100. Jika melihat IKK di Indonesia terdapat 11 wilayah provinsi yang memiliki tingkat harga bahan bangunan/ konstruksi yang relatif tinggi, hal ini dilihat dari IKK yang lebih dari 100. Adapun lima teratas Provinsi yang memiliki IKK terbesar yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat.

Kemudian dari IKK Provinsi Bengkulu yang ditunjukkan pada tabel 4 di bawah memperlihatkan bahwa wilayah dengan tingkat harga bahan bangunan/konstruksi yang relatif serupa dengan Provinsi Bengkulu adalah provinsi tetangga, yaitu Sumatera Selatan dan Jambi. Jika IKK Provinsi Bengkulu berada pada posisi ke-16 dengan indeks sebesar 96,21, maka Provinsi Sumatera Selatan berada di posisi ke-14 dengan indeks sebesar 98,80 dan Provinsi Jambi berada di posisi ke-18 dengan indeks sebesar 94,90.

<http://kaurkab.bps.go.id>

BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 33 tahun 2004.
2. IKK merupakan *spatial index*, yang digunakan untuk membandingkan antarwilayah, namun bukan perbandingan antarwaktu.
3. Setelah dilakukan penghitungan, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Kaur Tahun 2014 yaitu sebesar 103,32 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKK Provinsi Bengkulu sebesar 96,21 dan Nasional sebesar 100,00. Nilai tersebut menempatkan Kabupaten Kaur pada posisi ketiga diantara kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

<http://kaurkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kaur, 2014

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan (orang/km ²)
	(km ²)	(%)	Jumlah	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nasal	519,92	21,98	16.483	14,41	32
Maje	361,04	15,27	13.810	12,07	38
Kaur Selatan	92,75	3,92	15.514	13,56	167
Tetap	87,92	3,72	5.998	5,24	68
Kaur Tengah	26,40	1,12	4.454	3,89	169
Luas	124,88	5,28	4.920	4,30	39
Muara Sahung	256,00	10,82	5.547	4,85	22
Kinal	154,03	6,51	4.355	3,81	28
Semidang Gumay	64,91	2,74	5.508	4,81	85
Tanjung Kemuning	72,91	3,08	11.000	9,62	151
Kelam Tengah	35,84	1,52	6.307	5,51	176
Kaur Utara	49,80	2,11	6.558	5,73	132
Padang Guci Hilir	115,96	4,90	3.672	3,21	32
Lungkang Kule	32,00	1,35	3.365	2,94	105
Padang Guci Hulu	370,64	15,67	6.901	6,03	19
Jumlah	2.365,00	100,00	114.398	100,00	48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

Tabel 2. Panjang Jalan Menurut Pembiayaan, Jenis Permukaan, Kondisi, dan Kelas di Kabupaten Kaur, 2011-2014 (km)

Jenis Jalan	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
1. Pembiayaan	638,85	638,85	663,66	719,30
a. Jalan Negara	70,61	70,61	70,61	85,25
b. Jalan Provinsi	120,30	120,30	120,30	120,03
c. Jalan Kabupaten	447,94	447,94	472,75	514,02
2. Jenis Permukaan	638,85	638,85	663,66	719,30
a. Aspal	359,85	359,85	367,45	290,42
b. Kerikil	149,52	149,52	154,10	396,42
c. Tanah	118,25	118,25	130,90	32,46
d. Lainnya	11,23	11,23	11,23	0,00
3. Kondisi	638,85	638,85	663,66	719,30
a. Baik	490,85	490,85	515,66	399,56
b. Sedang	103,00	103,00	103,00	175,00
c. Rusak	45,00	45,00	45,00	94,09
d. Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	50,65
4. Kelas	638,85	638,85	663,66	719,30
a. Kelas I	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Kelas II	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Kelas III	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Kelas III A	70,65	70,65	70,65	70,65
e. Kelas III B	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Kelas III C	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Kelas Tdk Dirinci	568,20	568,20	593,01	648,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Kaur (Juta Rupiah), 2012-2014

Jenis Penerimaan	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Asli Daerah	7.781,83	10.376,76	18.656,72
a. Pajak Daerah	2.294,09	2.390,14	4.252,27
b. Retribusi Daerah	1.183,91	2.655,24	5.774,18
c. Bagian Laba BUMD	1482,98	2.491,15	3.423,03
d. Penerimaan Lain-lain	2.820,85	2.840,22	5.207,24
2. Dana Perimbangan	367.406,43	411.348,45	466.720,50
a. Bagi Hasil Pajak	23.645,88	21.003,81	13.919,78
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	4.271,37	4.200,61	11.489,55
c. Dana Alokasi Umum	301.076,66	329.881,35	371.883,43
d. Dana Alokasi Khusus	38.412,51	56.262,67	69.427,74
e. Dana Tunjangan Pend.	0,00	0,00	0,00
3. Pendapatan Daerah yang Sah	55.508,42	38.437,04	53.826,04
a. Pendapatan hibah	1000,00	0,00	0,00
b. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
Provinsi	10.098,21	9.103,47	12.480,23
d. Dana Penyesuaian dan			
Otonomi Khusus	44.410,22	29.333,57	40.845,81
e. Bantuan Keu. dari Prov	0,00	0,00	500,00
Jumlah	430.696,68	460.162,25	539.203,26

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kaur

Tabel4. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Kaur (Juta Rupiah), 2012-2014

Jenis Pengeluaran	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Belanja Tidak Langsung	204.881,96	217.795,61	221.791,72
a. Belanja Pegawai	177.289,05	195.664,66	196.191,23
b. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
c. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
d. Belanja Hibah	9.588,67	823,79	830,00
e. Belanja Bantuan Sosial	0,00	311,30	0,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
g. Belanja Bantuan Keu. kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	18.004,24	21.965,56	24.770,49
h. Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
2. Belanja Langsung	211.515,38	253.316,53	312.303,02
a. Belanja Pegawai	21.513,76	26.505,54	30.881,95
b. Belanja Barang dan Jasa	100.526,71	120.423,55	143.408,70
c. Belanja Modal	89.474,91	106.387,66	138.012,37
Jumlah	416.397,34	471.082,53	534.064,96

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kaur

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAUR**

Jl. Peltu M. Ilyas T. Panji Alam Padang Kempas Bintuhan
Telp. (0739) 6180009-10, Fax. (0739) 6180002
Homepage://kaurkab.bps.go.id Email:bps1704@bps.go.id